



**KEPALA DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA PAGERTOYO
NOMOR : 02 TAHUN 2026**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

2026



KEPALA DESA PAGERTOYO

KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PAGERTOYO
NOMOR **2** TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERTOYO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam peraturan Desa Pagertoyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
23. Keputusan Deputy I Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Model Dokumen Pengadaan Barang / Jasa di Desa melalui Penyedia;
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
25. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
40. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/2438/SJ Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih);
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
42. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

- Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 44. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 45. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 46. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 47. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 48. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih);
 49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/ PMK.70/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017 tentang (Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.70/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Pembangunan dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
 53. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 54. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
 55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 56. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
 57. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan

- Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
58. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
 59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
 60. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
 61. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 62. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal);
 63. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
 64. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan

- Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
65. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
 66. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47);
 67. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 68. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupten Kendal tahun 2020 Nomor 38);
 69. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 27);
 70. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
 71. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
 72. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);

73. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 34);
74. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
75. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
76. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
77. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
78. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 41);
79. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2017 Nomor 01);
80. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa

- Pagertoyo (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2018 Nomor 2);
81. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2024 Nomor 02);
82. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pagertoyo Tahun 2026 (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2025 Nomor 5);
83. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERTOYO
dan
KEPALA DESA PAGERTOYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PAGERTOYO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagertoyo
Tahun Anggaran 2025 adalah dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Lebih/Kurang
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	58.800.000	58.800.000	-
Pendapatan Transfer	1.114.445.077	1.091.310.529	23.134.548
Dana Desa	609.677.600	601.078.400	8.599.200
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	147.924.823	143.540.581	4.384.242
Alokasi Dana Desa	349.261.000	346.691.548	2.569.452
Pendapatan Lain-lain	7.581.654	-	7.581.654
JUMLAH PENDAPATAN	1.173.245.077	1.150.110.529	23.134.548

BELANJA DESA			
BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA	584.873.409	570.152.192	6.976.615
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	231.612.000	229.320.000	2.292.000
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	24.000.000	24.000.000	-
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	70.300.000	68.969.000	1.331.000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	36.000.000	36.000.000	-
JUMLAH BELANJA	1.173.245.077	1.150.110.529	23.134.548
SURPLUS / (DEFISIT)	-	-23.134.548	23.134.548
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	48.537.586	48.537.586	-
Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000	200.000.000	-
PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-
SISA LEBIH/KURANG) PERHITUNGAN BERJALAN	-	23.134.548	(23.134.548)

Pasal 2

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat :

- Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025.
- Lampiran II Laporan Realisasi Anggaran Desa Tahun Anggaran 2025.
- Lampiran III Laporan Realisasi Anggaran Desa Per Kegiatan Tahun Anggaran 2025.
- Laporan Program Pemerintah Provinsi dan Program Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pagertoyo.

Ditetapkan di Pagertoyo
Pada tanggal 27 Februari 2026
KEPALA DESA PAGERTOYO



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

Hal

- I. Laporan Realisasi APBDes
- II. Catatan Atas Laporan Keuangan
 - A. Informasi Umum
 - B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
 - C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas
 - 2. Pendapatan Asli Desa
 - 3. Dana Desa
 - 4. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
 - 5. Alokasi Dana Desa
 - 6. Bantuan Keuangan Provinsi
 - 7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
 - 8. Pendapatan Lain-lain
 - 9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 11. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 12. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - 13. Belanja Desa Dalam Klasifikasi Ekonomi
 - 14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang
 - 15. Pembiayaan
 - 16. Aset Desa
 - 17. Penyertaan Modal Desa

Lampiran :

Lampiran 1 Rincian Aset Tetap Desa

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		58.800.000,00	58.800.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.106.863.423,00	1.152.171.422,00	45.307.999,00
Dana Desa		609.677.600,00	646.393.200,00	36.715.600,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		147.924.823,00	150.877.922,00	2.953.099,00
Alokasi Dana Desa		349.261.000,00	354.900.300,00	5.639.300,00
Pendapatan Lain-lain		6.997.000,00	7.804.318,00	807.318,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.172.660.423,00	1.218.775.740,00	46.115.317,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		588.373.409,00	573.652.192,00	14.721.217,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		249.327.600,00	246.820.000,00	2.507.600,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		52.497.000,00	44.900.000,00	7.597.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		95.000.000,00	94.269.000,00	731.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.021.198.009,00	995.641.192,00	25.556.817,00
SURPLUS / (DEFISIT)		151.462.414,00	223.134.548,00	(71.672.134,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		48.537.586,00	0,00	48.537.586,00
Pengeluaran Pembiayaan		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(151.462.414,00)	(200.000.000,00)	48.537.586,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	23.134.548,00	(23.134.548,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



PAGERTOYO, 20 February 2026

KEPALA DESA

ROMIYANAH

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PAGERTOYO
TAHUN ANGGARAN 2025

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.106.863.423,00	1.152.171.422,00	(45.307.999,00)
4.2.1.	Dana Desa	609.677.600,00	646.393.200,00	(36.715.600,00)
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	147.924.823,00	150.877.922,00	(2.953.099,00)
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	349.261.000,00	354.900.300,00	(5.639.300,00)
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.997.000,00	7.804.318,00	(807.318,00)
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	6.997.000,00	6.997.000,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	807.318,00	(807.318,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.172.660.423,00	1.218.775.740,00	(46.115.317,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	407.054.880,00	402.517.528,00	4.537.352,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	65.400.000,00	64.986.000,00	414.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	290.264.520,00	287.393.170,00	2.871.350,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.287.360,00	18.938.358,00	349.002,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	32.103.000,00	31.200.000,00	903.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	267.134.386,00	250.424.664,00	16.709.722,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	145.937.386,00	138.235.000,00	7.702.386,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	50.050.000,00	49.900.000,00	150.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	11.150.000,00	10.800.000,00	350.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	20.400.000,00	20.589.664,00	(189.664,00)
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	31.497.000,00	23.300.000,00	8.197.000,00
5.3.	Belanja Modal	311.008.743,00	306.699.000,00	4.309.743,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	93.481.143,00	90.300.000,00	3.181.143,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	92.527.600,00	92.019.000,00	508.600,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	95.000.000,00	94.950.000,00	50.000,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	30.000.000,00	29.430.000,00	570.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.021.198.009,00	995.641.192,00	25.556.817,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	151.462.414,00	223.134.548,00	(71.672.134,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	48.537.586,00	0,00	48.537.586,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	48.537.586,00	0,00	48.537.586,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(151.462.414,00)	200.000.000,00	48.537.586,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	23.134.548,00	(23.134.548,00)



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PAGERTOYO
TAHUN ANGGARAN 2025

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.106.863.423,00	1.152.171.422,00	(45.307.999,00)
	4.2.1.	Dana Desa	609.677.600,00	646.393.200,00	(36.715.600,00)
	4.2.1.01.	Dana Desa	609.677.600,00	646.393.200,00	(36.715.600,00)
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	147.924.823,00	150.877.922,00	(2.953.099,00)
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	147.924.823,00	150.877.922,00	(2.953.099,00)
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	349.261.000,00	354.900.300,00	(5.639.300,00)
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	349.261.000,00	354.900.300,00	(5.639.300,00)
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.997.000,00	7.804.318,00	(807.318,00)
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	6.997.000,00	6.997.000,00	0,00
	4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	6.997.000,00	6.997.000,00	0,00
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	807.318,00	(807.318,00)
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	807.318,00	(807.318,00)
JUMLAH PENDAPATAN			1.172.660.423,00	1.218.775.740,00	46.115.317,00
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>588.373.409,00</u>	<u>573.652.192,00</u>	<u>14.721.217,00</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>484.707.809,00</u>	<u>477.382.192,00</u>	<u>7.325.617,00</u>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.400.000,00	46.986.000,00	414.000,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	47.400.000,00	46.986.000,00	414.000,00
1.1.1	5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>47.400.000,00</i>	<i>46.986.000,00</i>	<i>414.000,00</i>
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	41.400.000,00	40.986.000,00	414.000,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	249.464.520,00	246.593.170,00	2.871.350,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	249.464.520,00	246.593.170,00	2.871.350,00
1.1.2	5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>249.464.520,00</i>	<i>246.593.170,00</i>	<i>2.871.350,00</i>
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	228.464.520,00	225.593.170,00	2.871.350,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.287.360,00	18.938.358,00	349.002,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	19.287.360,00	18.938.358,00	349.002,00
1.1.3	5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>19.287.360,00</i>	<i>18.938.358,00</i>	<i>349.002,00</i>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.583.360,00	2.583.360,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	16.704.000,00	16.354.998,00	349.002,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	49.652.929,00	48.029.664,00	1.623.265,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.621.786,00	32.129.664,00	1.492.122,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.121.786,00	12.940.000,00	1.181.786,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	6.893.099,00	6.395.000,00	498.099,00
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	643.218,00	500.000,00	143.218,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	395.469,00	345.000,00	50.469,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.190.000,00	5.700.000,00	490.000,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.600.000,00	3.789.664,00	(189.664,00)
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.600.000,00	3.567.000,00	33.000,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	132.664,00	(132.664,00)
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	90.000,00	(90.000,00)
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	4.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	16.031.143,00	15.900.000,00	131.143,00
1.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	16.031.143,00	15.900.000,00	131.143,00
1.1.4	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	16.031.143,00	15.900.000,00	131.143,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	32.103.000,00	31.200.000,00	903.000,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	32.103.000,00	31.200.000,00	903.000,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	32.103.000,00	31.200.000,00	903.000,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.90.	Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawara	903.000,00	0,00	903.000,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	900.000,00	900.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	13.000.000,00	11.835.000,00	1.165.000,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	11.835.000,00	1.165.000,00
1.1.8	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	2.000.000,00	1.535.000,00	465.000,00
1.1.8	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.000.000,00	1.535.000,00	465.000,00
1.1.8	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada</i>	11.000.000,00	10.300.000,00	700.000,00
1.1.8	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	11.000.000,00	10.300.000,00	700.000,00
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.91	5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.91	5.1.1.90.	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu)	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
1.1.92	5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
1.1.92	5.1.2.90.	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu)	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
1.2		<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	35.000.000,00	33.600.000,00	1.400.000,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	35.000.000,00	33.600.000,00	1.400.000,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	33.600.000,00	1.400.000,00
1.2.1	5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</i>	35.000.000,00	33.600.000,00	1.400.000,00
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	5.000.000,00	4.750.000,00	250.000,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	30.000.000,00	28.850.000,00	1.150.000,00
1.3		<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</u>	5.000.000,00	4.100.000,00	900.000,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	4.100.000,00	900.000,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.100.000,00	900.000,00
1.3.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	4.100.000,00	3.200.000,00	900.000,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	100.000,00	100.000,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	1.600.000,00	800.000,00
1.3.2	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	900.000,00	900.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	900.000,00	900.000,00	0,00
1.4		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u>	61.865.600,00	56.770.000,00	5.095.600,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.065.600,00	15.050.000,00	2.015.600,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.065.600,00	15.050.000,00	2.015.600,00
1.4.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	17.065.600,00	15.050.000,00	2.015.600,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.715.600,00	1.700.000,00	15.600,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	15.350.000,00	13.350.000,00	2.000.000,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.000.000,00	9.070.000,00	930.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.070.000,00	930.000,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	9.070.000,00	930.000,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.665.000,00	5.270.000,00	395.000,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.090.000,00	1.000.000,00	90.000,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.245.000,00	2.800.000,00	445.000,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	29.800.000,00	28.200.000,00	1.600.000,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.4.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.4.8	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.4.8	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.4.8	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.4.8	5.3.	Belanja Modal	22.600.000,00	21.000.000,00	1.600.000,00
1.4.8	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	22.600.000,00	21.000.000,00	1.600.000,00
1.4.8	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.600.000,00	21.000.000,00	1.600.000,00
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	5.000.000,00	4.450.000,00	550.000,00
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.450.000,00	550.000,00
1.4.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.650.000,00	2.450.000,00	200.000,00
1.4.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
1.4.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00
1.4.91	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
1.4.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
1.4.91	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
1.4.91	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
1.4.91	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.350.000,00	2.000.000,00	350.000,00
1.4.91	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.4.91	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.350.000,00	2.000.000,00	350.000,00
1.5		Sub Bidang Pertanahan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.5.6		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.5.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.5.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.5.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.5.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.5.6	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	249.327.600,00	246.820.000,00	2.507.600,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	49.327.600,00	49.050.000,00	277.600,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.1	5.3.	Belanja Modal	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
2.1.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
2.1.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
2.1.5		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
2.1.5	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
2.1.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.5	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.7		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	27.527.600,00	27.250.000,00	277.600,00
2.1.7	5.3.	Belanja Modal	27.527.600,00	27.250.000,00	277.600,00
2.1.7	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	27.527.600,00	27.250.000,00	277.600,00
2.1.7	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	0,00	0,00	0,00
2.1.7	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	2.010.000,00	2.000.000,00	10.000,00
2.1.7	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	25.294.000,00	25.250.000,00	44.000,00
2.1.7	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	223.600,00	0,00	223.600,00
2.2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>75.000.000,00</u>	<u>73.390.000,00</u>	<u>1.610.000,00</u>
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	50.000.000,00	49.350.000,00	650.000,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.750.000,00	47.150.000,00	600.000,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	38.650.000,00	38.150.000,00	500.000,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.400.000,00	1.350.000,00	50.000,00
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	750.000,00	600.000,00	150.000,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	31.400.000,00	31.100.000,00	300.000,00
2.2.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.100.000,00	9.000.000,00	100.000,00
2.2.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	9.100.000,00	9.000.000,00	100.000,00
2.2.2	5.3.	Belanja Modal	2.250.000,00	2.200.000,00	50.000,00
2.2.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	2.250.000,00	2.200.000,00	50.000,00
2.2.2	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	2.250.000,00	2.200.000,00	50.000,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.000.000,00	24.040.000,00	960.000,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	18.040.000,00	960.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	13.550.000,00	12.640.000,00	910.000,00
2.2.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.400.000,00	2.200.000,00	200.000,00
2.2.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	390.000,00	210.000,00
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.550.000,00	10.050.000,00	500.000,00
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.250.000,00	4.200.000,00	50.000,00
2.2.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.250.000,00	1.200.000,00	50.000,00
2.2.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.4	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	125.000.000,00	124.380.000,00	620.000,00
2.3.1		Pemeliharaan Jalan Desa	0,00	0,00	0,00
2.3.1	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.3.1	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00
2.3.1	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	0,00	0,00	0,00
2.3.1	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
2.3.1	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00
2.3.1	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	0,00	0,00
2.3.2		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	30.000.000,00	29.430.000,00	570.000,00
2.3.2	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	29.430.000,00	570.000,00
2.3.2	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	30.000.000,00	29.430.000,00	570.000,00
2.3.2	5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pel	300.000,00	300.000,00	0,00
2.3.2	5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga K	4.320.000,00	4.020.000,00	300.000,00
2.3.2	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/M	24.980.000,00	24.710.000,00	270.000,00
2.3.2	5.3.8.04.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralata	400.000,00	400.000,00	0,00
2.3.3		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	95.000.000,00	94.950.000,00	50.000,00
2.3.3	5.3.	Belanja Modal	95.000.000,00	94.950.000,00	50.000,00
2.3.3	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	95.000.000,00	94.950.000,00	50.000,00
2.3.3	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	300.000,00	300.000,00	0,00
2.3.3	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	14.325.000,00	14.310.000,00	15.000,00
2.3.3	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	77.210.000,00	77.180.000,00	30.000,00
2.3.3	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	3.165.000,00	3.160.000,00	5.000,00
2.3.6		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
2.3.6	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.3.6	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.6	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	0,00	0,00	0,00
2.3.6	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	0,00	0,00	0,00
2.3.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	0,00	0,00	0,00
2.3.6	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	0,00	0,00	0,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	0,00	0,00	0,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00
2.3.14	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	0,00	0,00	0,00
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00
2.3.14	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	0,00	0,00
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>52.497.000,00</u>	<u>44.900.000,00</u>	<u>7.597.000,00</u>
3.1		<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.1.3		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.1.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.1.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.2		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>20.497.000,00</u>	<u>13.000.000,00</u>	<u>7.497.000,00</u>
3.2.1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	20.497.000,00	13.000.000,00	7.497.000,00
3.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.497.000,00	13.000.000,00	7.497.000,00
3.2.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	20.497.000,00	13.000.000,00	7.497.000,00
3.2.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	6.997.000,00	0,00	6.997.000,00
3.2.1	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan unt	13.500.000,00	13.000.000,00	500.000,00
3.3		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.3.6		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>24.000.000,00</u>	<u>23.900.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	17.600.000,00	17.500.000,00	100.000,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.600.000,00	3.500.000,00	100.000,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>95.000.000,00</u>	<u>94.269.000,00</u>	<u>731.000,00</u>
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>87.000.000,00</u>	<u>86.769.000,00</u>	<u>231.000,00</u>
4.2.2		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	65.000.000,00	64.769.000,00	231.000,00
4.2.2	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	64.769.000,00	231.000,00
4.2.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	65.000.000,00	64.769.000,00	231.000,00
4.2.2	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	300.000,00	300.000,00	0,00
4.2.2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	13.815.000,00	13.680.000,00	135.000,00
4.2.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	50.485.000,00	50.389.000,00	96.000,00
4.2.2	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	400.000,00	400.000,00	0,00
4.2.5		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
4.2.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
4.2.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
4.2.5	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00
4.2.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.5	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.2.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.2.5	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.2.5	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.2.5	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
4.2.5	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
4.4		<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,</u>	<u>8.000.000,00</u>	<u>7.500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.000.000,00	7.500.000,00	500.000,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.500.000,00	500.000,00
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00
4.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.650.000,00	2.400.000,00	250.000,00
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	100.000,00	50.000,00
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.4.1	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan	0,00	0,00	0,00
4.5.2		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	0,00	0,00	0,00
4.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.5.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.5.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
5.1.0		Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.021.198.009,00	995.641.192,00	25.556.817,00
SURPLUS / (DEFISIT)			151.462.414,00	223.134.548,00	(71.672.134,00)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	48.537.586,00	0,00	48.537.586,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	48.537.586,00	0,00	48.537.586,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	48.537.586,00	0,00	48.537.586,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			(151.462.414,00)	(200.000.000,00)	48.537.586,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	23.134.548,00	(23.134.548,00)

PAGERTOYO, 18 February 2026

KEPALA DESA

ROMIYANAH

